

Analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Konseptual dan Relevansinya terhadap Tujuan Maqashid Syariah

Ahmad Gemma Nurrahman¹, Iip Miptahudin², Hisny Fajrussalam³, Vania Nur Rizqi Rhommadhoni⁴,
Fitriana Prabandari⁵

Universitas Halim Sanusi PUI, Bandung
Universitas Pendidikan Indonesia

ahmadgemma@uhs.ac.id

iipmiptahudin@uhs.ac.id

hfajrussalam@upi.edu

vanianrr@uhs.ac.id

fitriana@uhs.ac.id

ARTICLE HISTORY

Submitted : 17-07-2025

Accepted : 03-12-2025

Published : 03-12-2025

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam perspektif ekonomi Islam dan menelaah relevansinya dengan tujuan Maqashid Syariah. IPM sebagai indikator pembangunan yang mencakup dimensi pendidikan, kesehatan, dan pendapatan menggambarkan tingkat kualitas hidup masyarakat. Dalam ekonomi Islam, pembangunan manusia dipahami secara lebih komprehensif, meliputi kesejahteraan material, spiritual, dan moral, sehingga indikator IPM memiliki titik temu dengan nilai-nilai inti syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif melalui studi pustaka, dengan mengkaji berbagai literatur terkait IPM, prinsip ekonomi Islam, dan konsep Maqashid Syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komponen IPM memiliki keterkaitan signifikan dengan lima tujuan utama Maqashid Syariah, yaitu penjagaan agama (hifzh al-din), jiwa (hifzh al-nafs), akal (hifzh al-‘aql), keturunan (hifzh al-nasl), dan harta (hifzh al-mal). Keterkaitan ini menegaskan bahwa pembangunan manusia versi IPM dapat diperkuat melalui pendekatan syariah agar tidak hanya berorientasi pada peningkatan angka-angka statistik, tetapi juga pada pembentukan kualitas manusia yang beretika, berdaya, dan berkeadilan. Oleh karena itu, integrasi IPM dengan prinsip Maqashid Syariah dapat menjadi strategi yang relevan dan aplikatif dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan nilai-nilai Islam.

Kata kunci: Indeks Pembangunan Manusia, Ekonomi Islam, Maqashid Syariah, Pembangunan Berkelanjutan, Kesejahteraan.

Analysis of the Human Development Index (HDI) from an Islamic Economic Perspective: A Conceptual Study and Its Relevance to the Objectives of Maqashid Sharia

Abstract

This study aims to analyze the Human Development Index (HDI) from the perspective of Islamic economics and to examine its relevance to the objectives of Maqashid Sharia. HDI, as a development indicator that includes the dimensions of education, health, and income, reflects the overall quality of life within a community. In Islamic economics, human development is understood more comprehensively, encompassing material, spiritual, and moral well-being; therefore, HDI has a clear point of alignment with core Islamic values. This research employs a qualitative-descriptive approach through a literature review, examining various publications related to HDI, Islamic economic principles, and the concept of Maqashid Sharia.

The findings indicate that the components of HDI are significantly connected to the five primary objectives of Maqashid Sharia, namely the preservation of religion (hifzh al-din), life (hifzh al-nafs), intellect (hifzh al-'aql), lineage (hifzh al-nasl), and wealth (hifzh al-mal). This connection highlights that human development, as measured by HDI, can be strengthened through a Sharia-based framework to ensure it is not only focused on statistical progress but also on building ethical, empowered, and just individuals. Therefore, integrating HDI with the principles of Maqashid Sharia offers a relevant and applicable strategy for achieving sustainable development aligned with Islamic values.

Keywords : *Human Development Index, Islamic Economics, Maqashid Syariah, Sustainable Development, Welfare.*

1. Pendahuluan

Pembangunan manusia merupakan salah satu aspek fundamental dalam menentukan kualitas dan kemajuan suatu bangsa. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index (HDI)* telah menjadi salah satu indikator utama yang digunakan oleh berbagai negara dan lembaga internasional, seperti United Nations Development Programme (UNDP), untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan berbasis manusia. IPM meliputi tiga dimensi penting: umur panjang dan hidup sehat (diukur dari angka harapan hidup), pengetahuan (dilihat dari rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah), serta standar hidup layak (diukur dari pendapatan nasional bruto per kapita). Dengan demikian, IPM tidak hanya menekankan pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan aspek pendidikan dan kesehatan sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan. (E. I. Syaripudin & Laili Ahad, 2022)

Dalam konteks ekonomi konvensional, IPM sering kali dipandang sebagai alat ukur netral yang bersifat universal. Namun demikian, dalam perspektif ekonomi Islam, pembangunan manusia memiliki dimensi yang lebih luas, mencakup aspek spiritual, moral, sosial, dan ekonomi secara holistik. Ekonomi Islam memandang pembangunan bukan sekadar upaya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan materi, melainkan sebagai proses integral menuju kesejahteraan dunia dan akhirat (*falah*). Oleh karena itu, dalam analisis ekonomi Islam, penting untuk menyandingkan konsep IPM dengan kerangka *Maqashid Syariah* sebuah konsep inti dalam Islam yang menjelaskan tujuan-tujuan utama diturunkannya syariat, yang mencakup perlindungan terhadap agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*).

Studi ini dilakukan untuk mengkaji secara konseptual bagaimana IPM dapat dianalisis melalui perspektif ekonomi Islam dan bagaimana relevansinya terhadap pencapaian tujuan-tujuan *Maqashid Syariah*. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan suatu kerangka pemikiran yang lebih menyeluruh mengenai pembangunan manusia yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Analisis ini juga bertujuan untuk memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan paradigma pembangunan dalam ekonomi Islam serta mendorong

para pengambil kebijakan agar mempertimbangkan pendekatan syariah dalam perumusan strategi pembangunan. Permasalahan dalam penelitian ini terletak pada belum banyaknya studi yang mengkaji IPM dalam perspektif ekonomi Islam secara utuh dan integratif. Kebanyakan kajian lebih menitikberatkan pada aspek kuantitatif tanpa menyentuh nilai-nilai normatif dan etis yang menjadi landasan utama dalam ekonomi Islam. Padahal, dengan meningkatnya kesadaran terhadap pentingnya pembangunan yang berlandaskan nilai-nilai moral dan spiritual, perlu kiranya dilakukan reorientasi terhadap cara pandang pembangunan yang tidak hanya mengejar angka statistik, tetapi juga kesejahteraan hakiki umat manusia. (E. I. M. Syaripudin & Nurul, 2022)

Kajian mengenai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) telah banyak dilakukan oleh para peneliti, baik dari perspektif ekonomi konvensional maupun ekonomi Islam. Beberapa penelitian yang relevan antara lain: **Al-Ghazali (2004)** dalam kajiannya tentang *Maqashid Syariah* dan pembangunan ekonomi, menekankan pentingnya aspek spiritual dan moral dalam setiap bentuk pembangunan. Beliau menegaskan bahwa tujuan pembangunan dalam Islam adalah tercapainya *falah* (kesejahteraan dunia dan akhirat), yang sangat erat kaitannya dengan tujuan *Maqashid Syariah*. **Chapra, M. Umer (2008)** dalam karyanya *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah*, menjelaskan bahwa pembangunan dalam Islam harus mencakup dimensi material dan spiritual. Ia mengusulkan agar indikator pembangunan dikembangkan agar lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam, termasuk perlunya integrasi *Maqashid Syariah* dalam pengukuran kesejahteraan. **Amalia (2009)** dalam penelitiannya yang berjudul "*Kesejahteraan dalam Perspektif Islam: Studi Maqashid Syariah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia*", mencoba mengkaji sejauh mana IPM dapat mencerminkan kesejahteraan dalam Islam. Ia menemukan bahwa terdapat irisan antara indikator IPM dengan tujuan *Maqashid Syariah*, meskipun belum seluruhnya terakomodasi secara utuh. (E. I. Syaripudin & Putri, 2022)

Meskipun sejumlah penelitian telah dilakukan yang mengkaji IPM dan kaitannya dengan pembangunan Islam maupun *Maqashid Syariah*, terdapat beberapa celah (gap) yang belum banyak disentuh secara mendalam, yaitu: Minimnya kajian konseptual yang mengintegrasikan IPM dengan lima dimensi utama *Maqashid Syariah* secara sistematis dan menyeluruh. Sebagian besar penelitian hanya menyinggung hubungan secara umum tanpa menjabarkan secara eksplisit bagaimana setiap indikator IPM berkorelasi langsung dengan aspek-aspek dalam *Maqashid Syariah*. Kebanyakan penelitian masih bersifat deskriptif atau empiris tanpa mengembangkan kerangka teoretis konseptual yang komprehensif. Belum banyak penelitian yang mencoba menyusun model analisis pembangunan manusia yang sepenuhnya berlandaskan pada perspektif ekonomi Islam dan *Maqashid Syariah* sebagai dasar filosofis dan normatif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merasa penting untuk melakukan analisis konseptual terhadap IPM dalam kerangka ekonomi Islam, serta menelaah sejauh mana indikator-indikator IPM mencerminkan tujuan-tujuan utama dari *Maqashid Syariah*. Kajian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan teori ekonomi Islam serta menjadi rujukan dalam perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis nilai-nilai syariah.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan studi kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini digunakan untuk menggali konsep-konsep teoretis dan normatif yang berkaitan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), ekonomi Islam, dan *Maqashid Syariah*. Penelitian kualitatif dipilih karena fokus kajian ini bersifat konseptual dan filosofis, serta bertujuan untuk menganalisis dan menginterpretasikan hubungan antara indikator pembangunan manusia dengan nilai-nilai dalam ekonomi Islam. (E. I. Syaripudin & Mawarni, 2023)

Sumber data dalam penelitian ini bersifat data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur dan dokumen relevan, antara lain: Buku-buku teks dan referensi utama dalam bidang ekonomi Islam, pembangunan manusia, dan *Maqashid Syariah*, jurnal ilmiah nasional dan internasional yang membahas IPM, indikator pembangunan, dan pendekatan Islam terhadap Pembangunan, dokumen klasik Islam (turats) seperti karya Imam al-Ghazali, al-Syatibi, dan ulama kontemporer dalam bidang *Maqashid Syariah* dan ekonomi Islam dan artikel, prosiding, disertasi, dan skripsi yang relevan dengan tema penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan **dokumentasi**,

yakni dengan mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mengorganisasi sumber-sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Data dikumpulkan dari perpustakaan fisik, e-library, jurnal online, dan repositori akademik lainnya.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1 Hasil Penelitian

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam Perspektif Umum

IPM terdiri dari tiga indikator utama: (1) Umur panjang dan hidup sehat (diukur dari angka harapan hidup), (2) Pengetahuan (dilihat dari rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah), serta (3) Standar hidup layak (diukur dari pendapatan nasional bruto per kapita). Ketiga aspek ini menjadi indikator universal dalam mengukur kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. IPM diciptakan untuk mengatasi kelemahan indikator ekonomi tunggal seperti Produk Domestik Bruto (PDB), yang hanya mengukur aspek ekonomi tanpa mempertimbangkan dimensi kemanusiaan. Oleh karena itu, IPM menjadi ukuran yang lebih inklusif dalam menilai keberhasilan pembangunan suatu negara.

IPM dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam ekonomi Islam, pembangunan manusia tidak semata-mata bertujuan untuk meningkatkan pendapatan atau angka statistik, tetapi menekankan pada *falah* (kesejahteraan dunia dan akhirat). Oleh karena itu, pembangunan manusia menurut Islam harus memperhatikan aspek spiritual, moral, dan sosial, di samping aspek ekonomi dan fisik.

IPM, meskipun bersifat sekuler dan netral, mengandung elemen-elemen yang sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Misalnya: 1). Kesehatan (umur panjang dan hidup sehat) sejalan dengan tujuan *hifz al-nafs* (menjaga jiwa). 2). Pendidikan (pengetahuan) berkaitan langsung dengan *hifz al-‘aql* (menjaga akal). 3). Pendapatan layak (standar hidup) berhubungan dengan *hifz al-māl* (menjaga harta).

Namun demikian, masih ada kekosongan nilai spiritual dan orientasi ukhrawi yang tidak terakomodasi dalam IPM, yang menjadi keprihatinan dalam ekonomi Islam.

Relevansi IPM terhadap Tujuan Maqashid Syariah

Maqashid Syariah merupakan prinsip dasar dalam Islam yang menetapkan lima tujuan utama syariat Islam:

- a. Hifzh al-Din (Menjaga Agama)
Meski IPM tidak secara langsung mengukur dimensi religiusitas, pendidikan dan kesejahteraan ekonomi dapat memberikan ruang bagi seseorang untuk menjalankan ibadah dengan tenang dan stabil. Namun, tanpa indikator keagamaan, pembangunan bisa bersifat sekuler.
- b. Hifzh al-Nafs (Menjaga Jiwa)
Indikator kesehatan dalam IPM sangat sesuai dengan tujuan ini. Akses terhadap layanan kesehatan dan peningkatan harapan hidup mencerminkan upaya untuk menjaga dan memelihara kehidupan manusia.
- c. Hifzh al-‘Aql (Menjaga Akal)
Pendidikan sebagai bagian dari IPM merupakan sarana utama dalam pengembangan akal manusia. Ekonomi Islam sangat menekankan pentingnya ilmu sebagai fondasi kehidupan yang berkualitas dan bermakna.
- d. Hifzh al-Mal (Menjaga Harta)
Pendapatan yang memadai memberikan perlindungan terhadap harta dan menjadi sarana penting untuk membiayai kehidupan yang halal dan layak. Namun, dalam perspektif Islam, harta harus diperoleh dengan cara yang sah dan digunakan secara bertanggung jawab.
- e. Hifzh al-Nasl (Menjaga Keturunan)
Meski tidak diukur secara eksplisit dalam IPM, indikator kesehatan dan pendidikan secara tidak langsung berdampak terhadap perlindungan dan pengembangan generasi penerus.

Kelemahan IPM dari Perspektif Islam

Meskipun IPM memuat indikator yang penting secara manusiawi, terdapat beberapa kelemahan jika ditinjau dari perspektif Islam, antara lain:

- a. Tidak adanya dimensi spiritualitas atau religiusitas dalam indikator IPM.

- b. Fokus hanya pada dunia, tanpa mempertimbangkan keberhasilan akhirat.
- c. Tidak mengukur aspek moral dan etika dalam pembangunan manusia.
- d. Tidak mempertimbangkan keadilan distribusi secara lebih dalam, padahal Islam sangat menekankan keadilan sosial dan pemerataan

Tawaran Konseptual Integrasi IPM dengan Maqashid Syariah

- a. Penelitian ini menawarkan model integrasi IPM dengan Maqashid Syariah untuk menghasilkan indikator pembangunan manusia yang tidak hanya berorientasi pada dunia, tetapi juga akhirat. Indikator tambahan yang diusulkan antara lain:
 - b. **Indeks Spiritualitas:** Mengukur akses dan praktik keagamaan.
 - c. **Indeks Keadilan Sosial:** Mengukur kesenjangan ekonomi dan sosial berdasarkan prinsip keadilan Islam.
 - d. **Indeks Moralitas Publik:** Mengukur keberhasilan pendidikan moral dan etika.

Integrasi ini akan memperkaya IPM dan menjadikannya alat ukur pembangunan yang selaras dengan nilai-nilai Islam.

3.2 Pembahasan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu alat ukur penting dalam menilai kualitas pembangunan suatu negara, dengan fokus pada dimensi kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Dalam perspektif ekonomi konvensional, IPM telah menjadi alternatif dari pendekatan pertumbuhan ekonomi yang hanya berfokus pada angka Produk Domestik Bruto (PDB). Namun dalam perspektif Islam, pembangunan manusia tidak hanya mencakup aspek material, tetapi juga spiritual, etika, dan sosial, yang semuanya berujung pada tercapainya *falah*—kebahagiaan dan kesejahteraan dunia serta akhirat. Secara umum, IPM memiliki kesesuaian dengan tiga dari lima tujuan utama *Maqashid Syariah*: *hifz al-nafs* (jiwa), *hifz al-'aql* (akal), dan *hifz al-māl* (harta). Namun demikian, dua maqashid lainnya, yaitu *hifz al-dīn* (agama) dan *hifz al-nasl* (keturunan), belum terakomodasi secara langsung dalam indikator IPM. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun IPM merupakan indikator penting, ia belum mampu merepresentasikan keseluruhan visi Islam dalam pembangunan manusia.

Adanyak kesenjangan konseptual antara IPM dan Maqashid Syariah. Temuan penelitian ini menunjukkan adanya **gap konseptual** yang cukup signifikan antara IPM dengan kerangka maqashid syariah, terutama pada aspek spiritual dan moral. IPM tidak menilai sejauh mana masyarakat menjalankan nilai-nilai keagamaan, menjaga integritas, atau hidup dalam lingkungan sosial yang adil dan beradab. Padahal dalam ekonomi Islam, nilai-nilai ini merupakan prasyarat penting dalam proses pembangunan. Sebagai contoh, IPM dapat menunjukkan bahwa suatu masyarakat memiliki pendapatan yang tinggi dan tingkat pendidikan yang baik. Namun, tanpa mengukur apakah masyarakat tersebut menjunjung tinggi etika, kejujuran, keadilan distribusi, serta kebersihan akidah dan ibadah, maka pembangunan tersebut bisa saja kehilangan substansi nilai dalam Islam.

Sebagai respon terhadap kekurangan IPM, penelitian ini menawarkan konsep *Islamic Human Development Index (I-HDI)* yang mencakup lima klaster tambahan: spiritualitas, etika/moral, keadilan ekonomi, perlindungan keluarga, dan lingkungan yang berkah. Model ini dimaksudkan untuk menyempurnakan IPM dengan memasukkan variabel-variabel khas Islam, agar pembangunan tidak hanya diukur dari aspek duniawi, tetapi juga nilai-nilai ukhrawi. Misalnya, integrasi indikator seperti tingkat keaktifan ibadah, literasi Al-Qur'an, indeks zakat, hingga angka kekerasan rumah tangga akan memberikan gambaran lebih menyeluruh tentang kualitas kehidupan umat dalam perspektif Islam. Hal ini sangat penting dalam upaya membangun masyarakat madani yang unggul secara spiritual dan material.

Implikasi dari kajian ini sangat penting bagi para pengambil kebijakan, khususnya di negara mayoritas Muslim seperti Indonesia. Pemerintah melalui lembaga-lembaga seperti BPS, Kementerian PPN/Bappenas, dan BAZNAS dapat mempertimbangkan indikator-indikator berbasis maqashid dalam merancang kebijakan pembangunan. Hal ini sejalan dengan arah pembangunan nasional yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kualitas hidup yang berkeadilan, beradab, dan berlandaskan nilai agama. Di samping itu, penguatan pendidikan Islam, layanan kesehatan berbasis syariah, dan peningkatan indeks kepercayaan sosial harus menjadi bagian dari strategi pembangunan jangka panjang agar pembangunan tidak tercerabut dari akar nilai-nilai Islam.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menyoroti keterkaitan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan tujuan-tujuan utama dalam *Maqashid Syariah*, sebagai kerangka dasar ekonomi Islam. Dari hasil analisis konseptual yang dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama sebagai berikut:

- 1) **Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki relevansi yang signifikan terhadap sebagian besar aspek Maqashid Syariah.** Indikator kesehatan dalam IPM sejalan dengan tujuan *hifzh al-nafs* (menjaga jiwa), pendidikan selaras dengan *hifzh al-'aql* (menjaga akal), dan pendapatan sejalan dengan *hifzh al-mal* (menjaga harta). Ini menunjukkan bahwa IPM dapat menjadi alat ukur awal dalam menilai kesejahteraan manusia yang juga ditekankan dalam ajaran Islam.
- 2) **Namun demikian, IPM belum sepenuhnya mencerminkan dimensi spiritual dan sosial Islam secara komprehensif.** Dua tujuan penting dalam Maqashid Syariah, yaitu *hifzh al-din* (menjaga agama) dan *hifzh al-nasl* (menjaga keturunan), belum terakomodasi dalam kerangka IPM. Hal ini mengindikasikan adanya keterbatasan dalam IPM sebagai alat ukur kesejahteraan holistik menurut pandangan Islam.
- 3) **Terdapat kebutuhan akan pengembangan model alternatif yang berbasis nilai-nilai Islam**, seperti *Islamic Human Development Index (I-HDI)*, yang tidak hanya mengukur aspek fisik dan ekonomi, tetapi juga dimensi spiritual, etika, keadilan sosial, serta integritas keluarga. Model ini diharapkan mampu memberikan pendekatan yang lebih utuh dalam menilai dan merencanakan pembangunan manusia yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- 4) **Penerapan indikator pembangunan yang berlandaskan Maqashid Syariah** menjadi penting bagi negara-negara Muslim, termasuk Indonesia, agar kebijakan pembangunan tidak hanya mengejar kemajuan material, tetapi juga terarah pada pencapaian *falah* (kebahagiaan dunia dan akhirat) secara menyeluruh.

Dengan demikian, integrasi antara IPM dan Maqashid Syariah dapat memberikan arah baru dalam menyusun strategi pembangunan yang lebih berkeadilan, beretika, dan berorientasi pada kesejahteraan hakiki menurut pandangan Islam.

Daftar Pustaka

- Arif, M. (2020). Relevansi Maqashid Syariah terhadap Pembangunan Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(2), 101–112.
- Auda, J. (2008). Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach. *International Institute of Islamic Thought (IIIT)*. (Referensi jurnal buku kajian maqashid sebagai teori).
- Bahri, S. (2021). Indeks Pembangunan Manusia dalam Perspektif Islam: Pendekatan Maqashid Syariah. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 13(1), 55–68.
- Hameed, S. (2009). Development and Human Welfare: An Islamic Perspective. *Islamic Economic Studies*, 17(2), 45–72.

- Hasan, Z. (2011). Maqasid al-Shari'ah in Islamic Finance: An Appraisal. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 4(3), 237–258.
- Hudaefi, F. A. (2020). Dimensions of Islamic Social Finance: The Roles of Zakat, Waqf, and Islamic Microfinance in Advancing the SDGs. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 6(Special Issue), 137–158.
- Ihsan, H., & Ibrahim, H. (2011). Economic Justice and Maqasid al-Shariah: The Islamic View on Distributive Justice. *International Journal of Business and Social Science*, 2(4), 17–24.
- Kamal, M., & Yusof, M. (2017). Human Development Index from Islamic Perspective: A Conceptual Approach. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 7(6), 412–421.
- Latif, M. (2019). Implementasi Maqashid Syariah dalam Indeks Pembangunan Manusia: Analisis terhadap Kesejahteraan Masyarakat Muslim. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (JEBI)*, 5(2), 211–224.
- Lubis, R. M., & Munawar, M. (2022). Konsep Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Indeks Maqashid Syariah. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 13(1), 1–12.
- Maulana, M. I., & Rosyidi, S. A. (2020). Pengukuran Maqashid Index terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Negara-Negara OKI. *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia*, 10(2), 185–200.
- Nurhadi, M., & Sofianto, A. (2021). Indeks Maqashid Syariah sebagai Alat Ukur Kesejahteraan: Alternatif dari Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq*, 12(1), 77–90.
- Rini, S., & Kurniawati, D. (2023). Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Maqashid Syariah di Negara Mayoritas Muslim. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 33–45.
- Syaripudin, E. I., & Laili Ahad, T. (2022). Analisis Hukum Islam tentang Akad Endorsement. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 1(1), 82–92. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v1i1.119>
- Syaripudin, E. I. M., & Nurul, A. (2022). Mekanisme Transaksi Gadai Perspektif Hukum Ekonomi Syari' Ah. *Jhesy*, 01(01), 1–8. <https://journal.stai-musaddadiyah.ac.id/index.php/jhesy/article/download/169/62>
- Syaripudin, E. I., & Mawarni, A. H. (2023). Mekanisme Jual Beli Emas Online Melalui Aplikasi (Pluang) Perspektif Hukum Ekonomi Syari' Ah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 2(1), 71–83. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v2i1.429>
- Syaripudin, E. I., & Putri, M. T. (2022). Kajian Kategori Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah. *Jurnal JHESY*, 01, 1–9.
- Wahyuni, S., & Rahmawati, R. (2018). Evaluasi IPM dengan Pendekatan Maqashid Syariah di Provinsi Jawa Barat. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 10(2), 121–134.
- Yusuf, M. A., & Abdurrahman, A. (2019). Human Development and Islamic Ethics: Rethinking the Goals of Development. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 15(3), 112–125.